

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah ;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah ;
- c. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah ;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

| NO | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Formula Perhitungan | Penjelasan | Sumber Data |
|-----|---|---|--------|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) | (7) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Persentase OPD menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan | 100% | $\frac{\text{Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$ | OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan adalah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu yaitu paling lambat | Laporan Keuangan |

| NO | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Formula Perhitungan | Penjelasan | Sumber Data |
|-----|-----------------|---|--------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) | (7) |
| | | | | | dua bulan setelah tahun anggaran berakhir | |
| | | Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP | 90% | $\frac{\text{Jumlah laporan keuangan OPD yang sesuai SAP}}{\text{Jumlah laporan keuangan seluruh OPD}} \times 100\%$ | Laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP adalah laporan keuangan OPD yang memenuhi standar akuntansi pemerintah yaitu meliputi LRA,LO, LPE Neraca dan CAIk | Laporan Keuangan |
| | | Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti | 90% | $\frac{\text{Jumlah temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan BPK tentang pengelolaan keuangan}} \times 100\%$ | Temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti adalah Temuan BPK yang telah ditindaklanjuti OPD | Laporan Tindaklanjuti Hasil Temuan BPK |

| NO | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Formula Perhitungan | Penjelasan | Sumber Data |
|-----|---|--|--------|--|--|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) | (7) |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah | Presentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 3% | $\frac{\text{nilai sewa}}{\text{nilai KIB pengelola}} \times 100\%$ | Nilai sewa berdasarkan Laporan BMD yang dicatat oleh pengelola | Laporan BMD Pengelola |
| | | Presentase Pengamanan Barang Milik Daerah | 95% | $\frac{\text{Jumlah tanah milik PemKab yang telah bersertifikat}}{\text{Jumlah tanah milik Pemkab}} \times 100\%$ | Jumlah tanah milik Pemkab yang telah terhitung | Laporan Sertifikasi tanah Pemkab |
| | | Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti | 60% | $\frac{\text{Jumlah temuan BPK tentang pengelolaan Milik Daerah yang ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah temuan BPK tentang BMD}} \times 100\%$ | Temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti adalah Temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah ditindaklanjuti OPD | Laporan Tindaklanjut Hasil Temuan BPK |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan | Persentase penerbitan SP2D tepat waktu | 100% | $\frac{\text{Jumlah SP2D yang terbit dalam 2 (dua) hari kerja}}{\text{Jumlah SP2D}} \times 100\%$ | Jumlah SP2D adalah SPP/SPM dari SKPD yang | Register SP2D |

| NO | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Formula Perhitungan | Penjelasan | Sumber Data |
|-----|-----------------|-------------------|--------|--|---|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (5) | (7) |
| | perbendaharaan | | | Jumlah seluruh SP2D yang terbit | diproses menjadi SP2D dalam 2 hari | dalam 2 Hari |
| | | IKM Internal | 92 | Nilai IKM Internal Pelayanan Perbendaharaan | Nilai Survey IKM yang dilaksanakan secara Internal BPKAD atas layanan perbendaharaan | Survey IKM |
| | | IKM eksternal | 89 | Nilai IKM Eksternal Pelayanan Perbendaharaan | Nilai Survey IKM yang dilaksanakan secara eksternal kepada SKPD atas layanan perbendaharaan | Survey IKM |

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



LULUK ALIFAH, SE., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19691128 200312 2 008